



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono Nomor 16 Katonsari Demak Kode Pos : 59515

Telp. (0291) 685863 Fax. (0291) 685863

<http://www.demakkab.go.id> e-mail : perhubungan@demakkab.go.id

Demak, Agustus 2023

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Verifikasi
Rancangan Akhir Renja
Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Demak
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK**

ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 197005181990011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024



Safety Power Beauty

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan kerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perhubungan dalam periode tahun anggaran 2024. Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang dijadikan juga sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dalam persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan Perhubungan;
- c. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan Perhubungan;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) OPD memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD, serta selanjutnya sebagai dokumen resmi Renja untuk proses penyusunan RKA Dinas Perhubungan, KUA, PPAS, dan RAPBD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan pelaksanaan rencana kerja dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan serta pendanaan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Perhubungan antar bidang dan antar tingkat pemerintahan; Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan bidang Perhubungan;

4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Perhubungan. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2022.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun uraian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Perhubungan memiliki 2 Program dan 15 Kegiatan serta 26 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp.30.604.424.178,- dan terealisasi Rp.29.766.554.415,- atau 97,26%. Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah, secara rinci sebagai berikut :

1. Program Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai target 80%, alokasi anggaran sebesar Rp 25.344.924.178,00 dan realisasi keuangan Rp

24.524.895.048,00 (96,76%). Program ini memiliki 1 (satu) indikator Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti, yaitu Persentase Ketersediaan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan dengan target 80% terealisasi 98,82%, atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 sebesar 100% disebabkan komitmen bersama Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Sub Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terkait dengan Time Schedule pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022.

Meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah Pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di masa mendatang adalah mempertahankan komitmen dan lebih mengutamakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 6 (enam) Kegiatan dengan 6 Indikator antara lain Kegiatan:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 4.837.102.361 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 4.194.688.870 atau

mencapai 86,72%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 168.580.000 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 166.990.220,00 atau mencapai 99,06%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Peningkatan disiplin pegawai dengan mengadakan *capacity building* agar membangun keterampilan (skills) dan kemampuan (capabilities), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 278.169.865 dengan realisasi

pelaksanaan program sebesar Rp 266.865.335,00 atau mencapai 95,94%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Administrasi Umum Yang Terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran Rp 8.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 7.800.000,00 atau mencapai 97,50%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah BMD Yang Disediakan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengadaan Barang Milik Daerah berupa Dispenser yang akan dimanfaatkan penunjang kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 19.599.462.902,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 19.447.861.023,00 atau mencapai 99,23%. Kegiatan ini memiliki indikator Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan Jasa Surat Menyurat yang ditujukan kepada Lembaga, Kementerian, Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang kegiatan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 453.609.050,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 440.689.600,00 atau mencapai 97,15%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah BMD Yang Terpelihara dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pemeliharaan

Barang Milik Daerah terutama barang berupa gedung, kendaraan dan peralatan mesin lainnya seperti penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Alokasi anggaran sebesar Rp 5.259.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp 5.241.659.367,00 (99,66%). Program ini memiliki 1 indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian sangat tinggi, yaitu Persentase transportasi dan perhubungan darat terlayani realisasi 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 sebesar 100% disebabkan adanya persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan Time Schedule pada masing - masing Bidang, sering melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta melakukan percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada masing - masing kegiatan.

Berkaitan dengan tercapainya target, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang mengharuskan Lembaga, Kementerian, Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan nilai Produk Dalam Negeri (PDN) kurang lebih 30%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mengalami hambatan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang mengharuskan dalam pengadaan dilengkapi dengan nilai Produk Dalam Negeri (PDN), dimana masih banyaknya Penyedia Jasa yang belum mendaftarkan produk tersebut pada Kementerian Perindustrian.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di masa mendatang adalah perhitungan kandungan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) Pengadaan Barang/ Jasa harus ditangani lebih awal, agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan sesuai dengan Time Schedule.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu meningkatkan transportasi yang berkelanjutan, terkoneksi, efektif, aman, nyaman, dan selamat.

Kegiatan yang mendukung **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sejumlah 9 (sembilan) Kegiatan dengan 9 (Sembilan) Indikator antara lain:

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

Alokasi anggaran Rp 20.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 19.854.000,00 atau mencapai 99,27%. Kegiatan ini memiliki indikator Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil yang terbatas untuk melaksanakan Survey Lalu Lintas pada ruas jalan Kabupaten yang sudah ditentukan, serta peralatan yang digunakan sudah mengalami penyusutan fungsi. Upaya mengatasinya menurunkan semua Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil yang berada pada seksi tersebut untuk melaksanakan survey Lalu Lintas agar mempunyai hasil yang efektif, dan menggunakan peralatan yang seadanya.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa survey identifikasi timbulnya tarikan dan bangkitan transportasi pada suatu ruas jalan Kabupaten yang nantinya akan dijadikan sebagai data dukung kajian terkait dengan pertumbuhan dan simpul transportasi pada suatu daerah/ ruas jalan, yang mana akan menjadi pertumbuhan ekonomi

dan memudahkan konektifitas pengguna jalan yang akan melalui khususnya angkutan umum.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 4.165.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 4.156.932.447,00 atau mencapai 99,88%. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pertengahan tahun anggaran berjalan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa.

Upaya mengatasi dalam pembuatan rencana anggaran biaya pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan persentase nilai Produk Dalam Negeri (PDN) yang dikeluarkan pada *website* Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. serta terkendala terkait dengan cuaca pada pertengahan tahun hingga akhir tahun, dikarenakan adanya pekerjaan konstruksi dan pengecatan marka jalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengeringan beton dan marka jalan yang disebabkan curah hujan tinggi tersebut.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Kamera CCTV pemantauan arus lalu lintas jalan, Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan dan Pemeliharaan APILL dan *Warning Light*.

3) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

Alokasi anggaran Rp 120.000.000,00 dengan realisasi

pelaksanaan program sebesar Rp 119.204.800,00 atau mencapai 99,34%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang nantinya akan meningkatkan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Alokasi anggaran Rp 274.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 273.559.270,00 atau mencapai 99,84%. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase uji KIR angkutan umum dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Penyediaan Kartu Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berupa kalibrasi dan pemeliharaan alat uji beserta Gedung Uji.

5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 45.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 44.097.600,00 atau mencapai 97,99%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pertengahan tahun anggaran berjalan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas guna mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

6) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 10.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 8.679.500,00 atau mencapai 86,80%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah andalalin tersedia (Dengan Satuan:Bulan) dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota adalah Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) kini telah menjadi bagian yang penting dalam kebijakan pengelolaan kawasan suatu daerah.

Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas di sekitarnya. Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan infrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan, secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun, sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan sebagai Dinas Teknis yang menangani terkait Andalalin tersebut, pada tahun 2022 tidak banyak pertumbuhan pengembangan yang berada pada ruas jalan Kabupaten, sehingga Anggaran yang disediakan tidak terserap dengan maksimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan serta Instansi terkait seperti Dinputaru dan Kepolisian Kabupaten Demak mengadakan koordinasi bersama mengenai Sosialisasi Pentingnya andalalin dalam pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan transportasi pada daerah terdampak pembangunan tersebut.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian dokumen hasil andalalin yang dilaksanakan oleh pihak konsultan terhadap kesesuaian dokumen dan lapangan bersama dengan Dinas Teknis lainnya seperti DINPUTARU dan Kepolisian Kabupaten Demak untuk melakukan evaluasi kegiatan andalalin tersebut.

7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Alokasi anggaran Rp 265.500.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 265.458.000,00 atau mencapai 99,98%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Audit dan Inspeksi

Keselamatan LLAJ di Jalan, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, serta Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 30.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 29.998.750,00 atau mencapai 100%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Penyediaan Angkutan Umum dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

9) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 330.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 323.875.000,00 atau mencapai 98,14%. Kegiatan ini memiliki indikator

Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya.

Sehubungan dengan target, capaian dan realisasi pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berupa Tabel 2.1 yang berupa Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2022
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Lembar : 1

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	00				Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100	80,00	80,00	80,00	180,00	180,00
02	15	01				Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD)	Jumlah dokumen tersedia						-	
02	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	24,00	2,00
02	15	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml tenaga pegawai non PNS tersedia	47 Orang	47,00	47,00	47,00	100,00	94,00	2,00
02	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian yang	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
							terpenuhi							
02	15	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jml SDM pegawai meningkat	84 Orang	84,00	84,00	84,00	100,00	168,00	2,00
02	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	84 Orang	-	84,00	-	-	84,00	1,00
02	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum yang terpenuhi	5 Laporan	5,00	5,00	5,00	100,00	10,00	2,00
02	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	228 Alat	228,00	228,00	228,00	100,00	456,00	2,00
02	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6.454 Jenis	6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00	12.908,00	2,00
02	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik tersedia	-	-	-	-	-	-	-



Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	203.590 Lembar	203.590,00	203.590,00	203.590,00	100,00	407.180,00	2,00
02	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	402 Perjalanan	402,00	402,00	402,00	100,00	804,00	2,00
2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi elektronik yang berfungsi	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel		-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	7 Unit	12,00	7,00	7,00	100,00	19,00	2,71

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
							diadakan							
02	15	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya tersedia	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	2 Dokumen	2	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	700 Keping	-	700,00	700,00	100,00	1.400,00	2,00
02	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	12	12,00	12,00	100,00	24,00	2,00
02	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00



Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	18 Unit	17,00	18,00	18,00	100,00	36,00	2,00
02	15	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	25 Unit	25,00	25,00	25,00	1,00	50,00	2,00
02	15	01	2	09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
02	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	4 Paket	4,00	4,00	4,00	100,00	8,00	2,00
02	15	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/bangunan yang	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
						Bangunan Lainnya	direhabilitasi							
02	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
02	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jaringan transportasi dan LLAJ tersedia	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen perencanaan (Tatralok) dan angka kecelakaan tersedia	2 Paket	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	90%	90,00	90,00	90,00	100,00	180,00	2,00
02	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perlengkapan jalan tersedia	4 Paket	4,00	4,00	4,00	100,00	8,00	2,00
02	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jml fasilitas perlengkapan jalan terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola					-	-	-

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tersedia	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah halte terbangun	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal/feeder terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah operasional UPTD sarpras perhubungan tersedia	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum	90%	90,00	90,00	90,00	100,00	180,00	2,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedia	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah data base wajib uji berkala kendaraan bermotor	1 Paket	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji kendaraan bermotor	14000 Kartu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	28.000,00	2,00
02	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	12 Unit	12,00	12,00	12,00	100,00	24,00	2,00
02	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	2 Paket	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalalin di jalan kabupaten	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi andalalin terlaksana	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	2 Laporan	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengawasan, pengaturan dan operasional lalu lintas terlaksana	2 Kegiatan	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan umum	2 Laporan	2,00	2,00	2,00	100,00	4,00	2,00
02	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam	Jumlah angkutan penumpang tersedia	-	-	-	-	-	-	-

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
						1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
02	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasional angkutan	1 Kegiatan	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	11	02	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi keselamatan lalu lintas dan pelajar pelopor terlaksana	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-
02	15	02	2	25		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Angkutan Trayek Perkotaan	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (&) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02	15	02	2	25	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan terpilihnya pelajar pelopor	1 Kegiatan	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00
02	15	02	2	25	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan jasa angkutan terlaksana		-	-	-	-	-	-



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

No.	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Kondisi Terhadap Target RPKMD		
				Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPKMD	Realsasi	Tingkat Capaian
7	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI								
	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas tersedia	unit	-	-	-	90	0	-
	Pemasangan APILL	Jml APILL (Traffic Light/Warning Light) terpasang	paket	1	1	100	1	1	100
	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jml lampu penerangan jalan terpasang	Lokasi	3	3	100	2	3	150
	Pembuatan Marka Jalan	Jml marka jalan tersedia	m2	1014	1014	100	100	1014	1.014
	Pemasangan CCTV	Jml CCTV terpasang	paket	-	-	-	2	0	-
	Pemeliharaan CCTV	Jml CCTV jalan terpelihara	Lokasi	3	3	100	3	3	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 diukur dengan Indikator kinerja yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Masing-masing Urusan memiliki Indikator sendiri sendiri. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	SDGs	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	V				Angka	77,85	78,96	78,98	79	77,85	78,76	78,80	78,97	
2	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target	V				%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	V				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	V				Indeks	88,2	88,2	89,3	91,6	88,2	88,25	88,68	88,87	
5	Kinerja Lalu Lintas	V		V		Angka	0,21	0,38	0,41	0,45	0,19	0,21	0,25	0,28	
6	Rasio Konektifitas Kabupaten			V		Rasio	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum				V	Orang	31.250	32.700	34.100	36.900	12.126	18.586	21.523	21.900	
8	Rasio Ijin Trayek				V	Rasio	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00010	0,00012	0,00012	
9	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				V	Jumlah	13.140	11.269	11.569	11.869	14.283	10.150	10.564	10.857	
10	Jumlah Pelabuhan/ Terminal Bus				V	Jumlah	1	1	1	2	1	1	1	1	
11	Persentase Layanan Angkutan Darat				V	%	100	0,38	0,38	0,36	100	0,38	0,38	0,39	
12	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum				V	%	100	87,86	88,15	92	60,47	77,26	78,50	89,68	

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	SDGs	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	Pemasangan Rambu – Rambu				V	%	88	88,36	89,08	89,52	87,54	103	100	90	
14	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				V	Rasio	0,0009	0,0010	0,0009	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	
15	Jumlah Orang Melalui Dermaga/ Terminal Per Tahun				V	Orang	31.250	32.700	34.100	36.900	12.126	18.586	21.523	21.900	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika Isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganannya karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Oleh karena itu penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis yaitu meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang telah dilakukan, diperoleh rumusan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi;
2. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas;
3. Rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
7. Belum optimalnya perlengkapan jalan di kabupaten/kota;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir;

9. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum;
10. Belum adanya rancangan Konektifitas dan Integrasi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang akan mendukung efisiensi mobilitas Transportasi Pada Kabupaten Demak; dan
11. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasana pada Perlintasan Sebidang yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan.

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perhubungan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kebijakan Pemerintah diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Program BRT Trans Jateng adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memnuhi pelayanan masyarakat dibidang transportasi massal terutama untuk konektivitas wilayah Kedungsepur koridor 3 yaitu jalur Semarang-Demak.

Kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi

Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Demak akan melaksanakan perluasan kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yang diharapkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah dan berkesinambungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD berupa perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DBHCHT. Hasil Pemetaan (mapping) tersebut mengakibatkan berubahnya sub kegiatan pada formasi usulan pada Rankhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERHUBUNGAN				32,056,703	DINAS PERHUBUNGAN				32,046,342	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	91,60 %	29,291,703	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	91,60 %	28,770,042	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5,760,819	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	5,694,942	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4,310,819	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,968,487	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	1,450,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,726,455	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat	Dokumen	4,500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat	-	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	300,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	2,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	150,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	150,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	2,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	583,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	194,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	250,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164 Laporan	200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2498 Dokumen	4,500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	8,500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	350,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	14,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	50,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	150,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	150,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21,226,383	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	22,655,100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740 Laporan	2,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,195,383	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22,653,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	29,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Paket	1,050,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Paket	190,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	7 Unit	150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jabatan		Pajaknya			Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	125,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	90,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	60,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	70,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	100 Presentase	2,765,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	100 %	3,276,300	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	1,175,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2,278,262	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	50,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	730,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	2,178,262	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	395,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	100,000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4 Unit	300,000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	
	Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	200,000	Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	50,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	50,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	160,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	50,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	160,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	50,000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	180,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	170,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	15,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	15,000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	30,000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14000 Dokumen	50,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	40,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	100,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	100,000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	345,000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	360,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Unit	330,000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Dokumen	350,000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	15,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	10,000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	40,000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	5,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	20,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	5,000	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	20,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	2 Laporan	450,000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	2 Laporan	343,038	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	150,000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	75,000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	300,000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	268,038	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	2 Laporan	65,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	2 Dokumen	60,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	1 Unit	25,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	1 Dokumen	35,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	40,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25,000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60,000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka PD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan topdown.

Proses usulan program/kegiatan terhadap usulan para pemangku kepentingan sudah dipadukan sesuai dengan proses perencanaan, keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut usulan masyarakat baik lewat organisasi atau tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pokir				
1	Pengadaan Lampu Tenaga Surya	Desa Ngegot Kec.Mijen	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 100,000,000/ 1 Paket	Ditolak
2	Pengadaan Lampu Tenaga Surya	Desa Banteng Mati Kecamatan Mijen	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 100,000,000/ 1 Paket	Ditolak
3	PJU Batas Desa Wonosalam	Arah Menuju Pasar Wonosalam Kec. Wonosalam	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 200,000,000/1 Paket	Diterima
4	Pemasangan CCTV	Pondok Majapahit 1 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 100,000,000/ 1 Paket	Diterima
5	PJU jalur grogol	Desa Wonosalam Kec. Wonosalam	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 200,000,000/1 Paket	Diterima
	Musrenbang				
1	Penerangan Jalan Tempel-Bungo	Jalan Raya Tempel-Bungo, Kec Wedung Kab. Demak	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten	Rp. 200,000,000/ 1 Paket	Diterima

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			/Kota yang Tersedia		
2	Peneranangan Jalan Mutih Wetan -Bungo	Jalan Raya Desa Mutih Wetan - Desa Bungo	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 200,000,000/ 1 Paket	Diterima
3	lampu penerangan jalan antar desa Tanggul Bakung	jalan dari ajlan raya jepara - Demak menuju ke desa Tanggul, Kab. Demak	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Rp. 500,000,000/ 1 Paket	Diterima



BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan rencana strategis kementerian yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, maka program dari Renstra Kementerian Perhubungan di Kabupaten Demak adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi;

Berdasarkan tujuan kementerian perhubungan, perlu disusun pembangunan sub sector perhubungan darat, yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten

Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Perhubungan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perhubungan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renja Dinas Perhubungan yaitu:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka harus berdasarkan visi dan misi Bupati. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Demak adalah “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera” Adapun misi Bupati Demak yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,serta kehidupan bermasyarakat yang agamis,kondusif dan berbudaya
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Perhubungan maka perlu adanya tujuan dan sasaran, adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;

2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan. Bahwa berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terdapat dua Program yaitu

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Adapun rician jumlah kegiatan dan sub kegiatan yaitu terdapat 2 kegiatan dan 15 Sub kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu namun bersifat pemerataan berkesinambungan dan berkelanjutan, untuk itu lokasi program dan kegiatan tersebar seluruh Kabupaten Demak dalam wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					DINAS PERHUBUNGAN								32.046.342.800,00			32.046.342.800,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								32.046.342.800,00			32.046.342.800,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								32.046.342.800,00			32.046.342.800,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								28.770.042.800,00			28.770.042.800,00	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20.000.000,00			20.000.000,00	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	4 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.694.942.800,00			5.694.942.800,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Persentase pelayanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah laporan	- Semua Kecamatan,	91,60%	28 Orang/bulan	2 Laporan	3.968.487.000,00	PENDAPATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	28 Orang/bulan	3.968.487.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						sesuai standar pelayanan	Tunjangan ASN	keuangan	Semua Kel/Desa					ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tunjangan ASN		
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	12 Dokumen	2 Laporan	1.726.455.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.726.455.800,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.000.000,00				2.000.000,00
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi kepegawaian yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	1 Orang	2 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	2.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								194.000.000,00				194.000.000,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	1 Paket	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	1 Paket	2 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	1 Paket	2 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan								Alokasi Umum			
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	1 Paket	2 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	1 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan											
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60 % 100 %	12 Laporan	2 Laporan	59.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.000.000,00				14.000.000,00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	2 Unit	3 Laporan	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22.655.100.000,00				22.655.100.000,00
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60% 100 %	12 Laporan	2 Laporan	22.653.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.653.600.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								190.000.000,00				190.000.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase pelayanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Barang Milik	- Semua Kecamatan,	91,60%	4 Unit	6 Paket	90.000.000,00	Dana Transfer	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	90.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						sesuai standar pelayanan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Daerah yang terpelihara	Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	2 Unit	6 Paket	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	60.000.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	4 Unit	6 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15.000.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91,60%	2 Unit	6 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								3.276.300.000,00				3.276.300.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								10.000.000,00				10.000.000,00
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Lalu Lintas tersedia Kab. / Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								2.278.262.000,00				2.278.262.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Kab. Demak, Gajah, Gajah Kab. Demak, Karanganyar , Cangkring Kab. Demak, Karanganyar ,Wonoketingal Kab. Demak, Demak, Bolo	100 %	10 Unit	100 Persen	2.178.262.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	2.178.262.000,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan												
						Persentase sarana dan	Jumlah Perlengkapan Jalan	Persentase sarana	Kab. Demak, Semua	100 %	2 Unit	100 Persen	100.000.000,00	Dana Transfer	Jumlah Perlengkapan Jalan	2 Unit	100.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	yang Terehabilitasi dan Terpelihara	perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum	yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							50.000.000,00				50.000.000,00
2	15	02	2.04	0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Izin dan Fasilitas Parkir terlaksana	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo Kab. Demak, Demak, Kadilangu	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	50.000.000,00
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							170.000.000,00				170.000.000,00
2	15	02	2.05	0003		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Persentase Uji Kir Angkutan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 Persen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	30.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Uji Kir Angkutan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1600 Dokumen	100 Persen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	40.000.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase Uji Kir Angkutan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 Persen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	100.000.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								360.000.000,00				360.000.000,00
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.000.000,00
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan	Jumlah Manajemen dan Rekayasa	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua	100 %	4 Dokumen	2 Laporan	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan	4 Dokumen	350.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						dalam kondisi baik	Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Lalu Lintas Terlaksana	Kel/Desa					Alokasi Umum	Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								5.000.000,00				5.000.000,00
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Andalalin tersedia	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	5.000.000,00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								343.038.000,00				343.038.000,00
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	75.000.000,00
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum												
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	2 Laporan	268.038.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	12 Laporan	268.038.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						baik	Perusahaan Angkutan Umum							Umum	Perusahaan Angkutan Umum		
2	15	02	2.11			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							60.000.000,00				60.000.000,00
2	15	02	2.11	0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000,00
2	15	02	2.11	0003		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00
TOTAL													32.046.342.800,00				32.046.342.800,00

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam rangka mendukung program prioritas Bupati Demak, dapat dijelaskan program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
2. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
3. Pembuatan Marka Jalan
4. Pemasangan CCTV
5. Pemeliharaan CCTV

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi Dinas Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan
					Rwealisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI											
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Jumlah tempat ibadah/lembaga keagamaan yang mendapat bantuan	Km									
1	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas tersedia	Unit		0	-	42	78.540.000	125	100.000.000	90	2.15.02.2.06.0016
2	Pemasangan APILL	Jml APILL (Traffic Light/Warning Light) terpasang	Paket		1	80.000.000	-	-	2	80.000.000	1	2.15.02.2.02.0004
3	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jml lampu penerangan jalan terpasang	Lokasi		3	1.591.000.000	4	1.535.000.000	4	1.550.000.000	2	2.15.02.2.02.0002
4	Pembuatan Marka Jalan	Jml marka jalan tersedia	m2		1014	199.950.000	500	100.000.000	400	250.000.000	100	2.15.02.2.06.0016

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan
					Rwealisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Pemasangan CCTV	Jml CCTV terpasang	Paket		0	-	1	100.000.000	2	-	2	-
6	Pemeliharaan CCTV	Jml CCTV jalan terpelihara	Lokasi		3	60.000.000	4	45.000.000	3	20.000.000	3	2.15.02.2.02.0004
Jumlah						1.930.950.000		3.672.080.000		2.000.000.000		

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berisi tentang Program dan Kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan permasalahan yang ditemui. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Catatan penting

Rencana Kerja Dnas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 disusun dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari diakomodirnya usulan-usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokkir) Dewan.

Pengalokasian anggaran tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran/ pengalokasian anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Demak serta sumber pendanaan lainnya. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program/ kegiatan yang indikator kinerjanya belum memenuhi target lebih diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup memadai.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang baik dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Demak akan melakukan pemantauan, tindakan koreksi sesuai yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappeda-Litbang Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program dan kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program

kegiatan sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak (Pimpinan dan Staf) serta pihak eksternal terkait secara bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam Tahun Anggaran 2024.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	
2	15	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	
2	15	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	
2	15	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	
2	15	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	
2	15	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	
2	15	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	
2	15	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	
2	15	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	
2	15	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	
2	15	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	
2	15	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	

SEMULA								MENJADI										KET.
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	
2	15	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	
2	15	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	
2	15	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Dokumen	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Daerah									Perangkat Daerah			
2	15	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
2	15	1	203	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
2	15	1	203	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	
2	15	1	203	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	
2	15	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	
2	15	1	203	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
2	15	1	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi		2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi	Dokumen	
2	15	1	204	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	204	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	2	15	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	
2	15	1	204	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	2	15	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	
2	15	1	204	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	204	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	
2	15	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	15	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	
2	15	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	
2	15	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
2	15	1	205	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	
2	15	1	205	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	2	15	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	
2	15	1	205	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	2	15	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	
2	15	1	205	8	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	2	15	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	
2	15	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	
2	15	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	
2	15	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	
2	15	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	
2	15	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	

SEMULA								MENJADI										KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	
2	15	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	
2	15	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	
2	15	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	
2	15	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	
2	15	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	
2	15	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
2	15	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	
2	15	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	
2	15	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	
2	15	1	209	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	

SEMULA								MENJADI										KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	
2	15	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
2	15	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
2	15	1	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	2	15	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persen	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	Dokumen	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	Dokumen	
2	15	02	201	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	201	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	201	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
									2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
															Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
									2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	Persentase	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	%	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola .	Unit	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola .	Unit	
2	15	02	203	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	203	02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	2	15	02	2.03	0002	Pembangunan Gedung Terminal				
2	15	02	203	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	2	15	02	2.03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				
2	15	02	203	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	15	02	2.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				
2	15	02	203	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C				
									2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	
									2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit	
									2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	
									2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang	
									2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	Dokumen	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	Dokumen	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Laporan	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Kabupaten/Kota								Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	Persentase	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	Persentase	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Kendaraan Bermotor								Bermotor	Kendaraan Bermotor		
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	Laporan	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	Laporan	
2	15	02	206	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	206	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	2	15	02	2.06	0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
2	15	02	206	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.06	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
2	15	02	206	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	206	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				
									2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	
									2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan	
									2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit	
									2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
															Aman Selamat Sekolah (RASS)	diidentifikasi dan diawasi		
									2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	
									2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
									2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	
									2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	
									2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	
									2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	
									2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Prov insi	Laporan	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	Laporan	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah andalalin tersedia	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	207	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	2	15	02	2.07	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				
2	15	02	207	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.07	0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin				
2	15	02	207	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	
2	15	02	207	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	15	02	2.07	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				
									2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	
									2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	
2	15	02	208	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.08	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ				
2	15	02	208	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.08	0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
2	15	02	208	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	208	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	
2	15	02	208	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15	02	2.08	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				
									2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	
									2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
															Angkutan Umum	Perusahaan Angkutan Umum		
									2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
									2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	Jumlah Penyedian Angkutan Umum	Laporan	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	Jumlah Penyedian Angkutan Umum	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	209	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	15	02	209	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	
									2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
							Kabupaten/Kota								Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan	Dokumen	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya a Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah Operasi Angkutan Sewa	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
														Kewenangan Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	214	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				

SEMULA								MENJADI										KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	214	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	
									2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana.	Dokumen	2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Angkutan Taksi Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
																terlaksana.		
2	15	02	215	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
2	15	02	215	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota				

SEMULA								MENJADI								KET.		
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN
									2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit	
									2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam	Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan	Dokumen	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan	Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Kabupaten/Kota	Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Laporan	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET.
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
									2	15	02	2.16	0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggarany a Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	

Keterangan :



Kode Nomenklatur Nonaktif Subkegiatan



Rekomendasi Penggantian Kode Nomenklatur Subkegiatan Yang Dinonaktifkan

L A M P I R A N



FORM E.60

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2022

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	02	15	00				Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		28.304.395.471	8.722.064.096	25.344.924.178	462.795.465	1.751.479.360	1.608.545.765	1.246.413.435	0	5.069.234.025	10.227.246.192	-								
	02	15	01				Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD)	Jumlah dokumen tersedia		28.304.395.471								0	-									
	2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan		5.167.165.606	4.282.901.267	4.837.102.361	426.801.465	1.559.793.910	1.107.598.945	1.100.494.550	0	4.194.688.870	8.477.590.137									
	2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		3.742.165.606	3.087.750.000	3.325.419.641	3	359.623.775	3	1.046.832.760	836.529.525	796.375.130	6	3.039.361.190	6.127.111.190				1,637			
	2	15	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml tenaga pegawai non PNS tersedia		1.425.000.000	1.195.151.267	1.511.682.720	3	67.177.690	3	512.961.150	271.069.420	304.119.420	6	1.155.327.680	2.350.478.947				1,649			

Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022			
																TW I		TW II		TW III		TW IV								
2	3							4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x10 0%		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	15	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		0		80.000.000		168.580.000		-		63.140.000		103.850.220		-	0	166.990.220		246.990.220			
	2	15	01	2	05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jml SDM pegawai meningkat					168.580.000	3		3	63.140.000		103.850.220		-	6	166.990.220		166.990.220			#DIV/ 0!	
	2	15	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan				80.000.000		3		3						6	-				#DIV/ 0!		
	2	15	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum yang terpenuhi		235.000.000		308.616.100		278.169.865		20.576.000		94.784.350		73.769.600		77.735.385	0	266.865.335		575.481.435			
	2	15	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan		20.000.000		18.000.000		20.000.000	3	1.911.100	3	8.968.500		8.530.500		574.400,00	6	19.984.500		37.984.500		1,899	
	2	15	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		110.000.000		131.785.800		124.921.200	3	11.713.900	3	44.210.100		37.823.300		29.535.300	6	123.282.600		255.068.400		2,319	
	2	15	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		5.000.000				15.352.800	3	1.970.000	3	1.678.200		1.199.000		9.685.400	6	14.532.600		14.532.600		2,907	
	2	15	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik tersedia				41.000.000										0	-						

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022			
															TW I		TW II		TW III		TW IV								
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x10 0%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1 5	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			20.000.000		72.830.300		47.845.865	3	3.196.000	3	8.751.800		7.979.800		25.926.100	6	45.853.700		118.684.000		5,934
	2	1 5	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan			80.000.000		45.000.000		70.050.000	3	1.785.000	3	31.175.750		18.237.000		12.014.185	6	63.211.935		108.211.935		1,353
	2	1 5	0 1	2	0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata																0	-				
	2	1 5	0 1	2	0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi elektronik yang berfungsi																0	-				
	2	1 5	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan			0		3.564.051.929		8.000.000									0	-				
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					29.000.000			3		3												
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan					2.089.472.375			3		3						6	-				
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel						33.000.000			3		3											

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				569.900.554		8.000.000	3		3				7800000	6	7.800.000					
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya tersedia													0	-						
	2	1 5	0 1	2	0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000			3		3												
	2	1 5	0 1	2	0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				642.679.000			3		3				6	-						
	2	1 5	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		22.711.681.865		230.700.000		19.599.462.902							0	-		230.700.000				
	2	1 5	0 1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim		1.200.000		2.200.000		1.200.000	3		3	720.000		300.000		180.000,00	6	1.200.000		3.400.000		2,833
	2	1 5	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi		22.710.481.865		228.500.000		19.598.262.902	3	1.522.853.36 4	3	7.491.463.831		5.105.879.782		5.326.464.046	6	19.446.661.023		19.675.161.023		0,866
	2	1 5	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan		190.548.000		255.794.800		453.609.050		15.418.000		33.761.100		323.327.000		68.183.500	0	440.689.600		696.484.400		

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022			
															TW I		TW II		TW III		TW IV								
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara														0	-						
	2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/la pangan yang terpelihara			180.000.000		131.754.800		156.380.000	3	10.628.000	3	31.001.100		76.567.000		26.553.500	6	144.749.600		276.504.400		1,536
	2	15	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara														0	-						
	2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mes in yang terpelihara			10.548.000			27.000.000	3	4.790.000	3	2.760.000		2.720.000		16.730.000,00	6	27.000.000		27.000.000		2,560	
	2	15	01	2	09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap terpelihara														0	-						
	2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangu nan yang direhabilitasi					124.040.000		270.229.050	3		3			244.040.000		24.900.000,00	6	268.940.000		392.980.000		#DIV/0!

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022			
															TW I		TW II		TW III		TW IV								
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/bangunan yang direhabilitasi														0	-						
	02	15	02				PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	100		574.500.000		21.695.003.040	100	5.259.500.000	25	109.082.100	25	448.191.950		1.455.642.572		2.904.867.745	50	4.917.784.367	100	26.612.787.407	100	4.632
	2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengelolaan Jaringan transportasi dan LLAJ tersedia			20.000.000		21.150.000		20.000.000		-		16.704.000		3.150.000		-	0	19.854.000		41.004.000		
	2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen perencanaan (Tatralok) dan angka kecelakaan tersedia			20.000.000		21.150.000		20.000.000	3	-	3	16.704.000		3.150.000		-	6	19.854.000		41.004.000		2,050
	2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik			120.000.000		20.346.680.240		4.165.000.000		55.600.000		138.175.000		1.304.775.972		2.658.381.475	0	4.156.932.447		24.503.612.687		
	2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perlengkapan jalan tersedia					20.346.680.240		4.165.000.000	3	55.600.000	3	138.175.000		1.304.775.972		2.658.381.475	6	4.156.932.447		24.503.612.687		#DIV/0!

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jml fasilitas perlengkapan jalan terpelihara		120.000.000												0	-					
	2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola		0		0		0								0	-					
	2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tersedia														0	-					
	2	15	02	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah halte terbangun														0	-					
	2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal/feede r terpelihara														0	-					
	2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana		20.000.000		75.550.000		120.000.000		12.747.100		86.362.100		16.720.600		3.375.000	0	119.204.800		194.754.800		

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah operasional UPTD sarpras perhubungan tersedia		20.000.000		75.550.000		120.000.000	3	12.747.100	3	86.362.100		16.720.600		3.375.000,00	6	119.204.800		194.754.800		9,738
Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum		244.000.000		567.742.000		274.000.000		2.500.000		91.912.000		53.256.500		125.890.770	0	273.559.270		841.301.270		
	2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedia				275.000.000			3		3						6	-				
	2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah data base wajib uji berkala kendaraan bermotor				747.000		75.000.000	3	2.500.000	3	12.500.000		52.198.000		7.500.000	6	74.698.000		75.445.000		#DIV/0!

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1 5	0 2	2	0 5	0 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji kendaraan bermotor		150.000.000		75.000.000		125.000.000	3	-	3	75.000.000		-		50.000.000	6	125.000.000		200.000.000		1,333
	2	1 5	0 2	2	0 5	0 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor		94.000.000		216.995.000		74.000.000	3	-	3	4.412.000		1.058.500		68.390.770	6	73.861.270		290.856.270		
	2	1 5	0 2	2	0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana		15.000.000		161.400.000		45.000.000		-		3.850.000		13.273.600		26.974.000	0	44.097.600		205.497.600		
	2	1 5	0 2	2	0 6	0 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan tersedia		15.000.000		161.400.000		45.000.000	3	-	3	3.850.000		13.273.600		26.974.000	6	44.097.600		205.497.600		13,700
Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	2	1 5	0 2	2	0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia		10.000.000		36.188.000		10.000.000		1.060.000		682.100		3.540.900		3.396.500	0	8.679.500		44.867.500		

Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
																TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3							4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x10 0%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	1 5	0 2	2	0 7	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalalin di jalan kabupaten		10.000.000		9.598.000		10.000.000	3	1.060.000	3	682.100		3.540.900		3.396.500	6	8.679.500		18.277.500		1,828	
	2	1 5	0 2	2	0 7	0 4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi andalalin terlaksana				26.590.000			3		3						6	-					
	2	1 5	0 2	2	0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia		115.500.000		415.287.800		265.500.000		31.575.000		99.633.000		57.175.000		77.075.000	0	265.458.000		680.745.800			
	2	1 5	0 2	2	0 8	0 3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana				150.000.000		19.200.000	3	54.300.000		47.700.000		28.800.000	3	150.000.000		150.000.000				#DIV/ 0!	
	2	1 5	0 2	2	0 8	0 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengawasan,p engaturan dan operasional lalu lintas terlaksana		115.500.000		415.287.800		115.500.000	3	12.375.000	3	45.333.000		9.475.000		48.275.000	6	115.458.000		530.745.800		4,595	

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1 5	0 2	2	0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan umum		30.000.000		38.600.000		30.000.000		5.600.000		10.873.750		3.750.000		9.775.000	0	29.998.750		68.598.750		
	2	1 5	0 2	2	0 9	0 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan penumpang tersedia				8.600.000			3		3					6	-					
	2	1 5	0 2	2	0 9	0 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasional angkutan terlaksana		30.000.000		30.000.000		30.000.000	3	5.600.000	3	10.873.750		3.750.000		9.775.000	6	29.998.750		59.998.750		2,000
	2	1 5	0 2	2	1 1	0 2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan		0												0	-					

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x10 0%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	15	02	2	11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi keselamatan lalu lintas dan pelajar pelopor terlaksana														0	-					
	2	15	02	2	11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan														0	-					
	2	15	02	2	25		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan			32.405.000		330.000.000		-		-											
	2	15	02	2	25	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan terpilihnya pelajar pelopor			2.405.000		330.000.000	3		3					323.875.000		323.875.000					

Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Tingkat Ca paian Kinerja da n Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota Tahun 2022		
															TW I		TW II		TW III		TW IV							
2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x10 0%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1 5	0 2	2	2 5	0 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan jasa angkutan terlaksana				30.000.000			3		3											

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi	√			

	pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			